

TAK SEKADAR LESTARIKAN BUDAYA

# Keistimewaan DIY Bermanfaat bagi Masyarakat

YOGYA (KR) - Meski manfaat dari Keistimewaan DIY semakin banyak dirasakan masyarakat, namun angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi membutuhkan perhatian semua pihak. Berbagai upaya juga terus dilakukan Pemda DIY untuk mewujudkan cita-cita keistimewaan dan menekan tingginya angka kemiskinan.

Mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem pendidikan dan pelatihan, sampai pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan agar cita-cita dari Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY dapat diwujudkan sesuai harapan.

"Selama 11 tahun ini, Keistimewaan DIY sudah banyak sekali memfasilitasi berbagai kegiatan budaya di DIY. Melalui berbagai kegiatan budaya yang difasilitasi menggunakan Dana Keistimewaan (Danais), harapannya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Memang sejauh ini pelaksanaan Danais belum yang terbaik, namun kami optimis ke depan bisa menyempurnakan. Mudah-mudahan Danais semakin *migunani, murakabi*



Narasumber FGD menyampaikan materi.

dan syukur-syukur *mrantasi* terhadap tujuan sesuai UUK," ujar Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Keistimewaan: Refleksi dan Optimisme ke Depan' di Kantor Paniradya Kaistimewan, Yogyakarta, Rabu (20/9).

Selain Aris Eko Nugroho, FGD menghadirkan narasumber Octo Lampito (Pemimpin Redaksi *Kedaulatan Rakyat*) dan Widhasto Wasana Putra (Sekber Keistimewaan DIY).

Menurut Aris, tujuan Keistimewaan DIY bukan sekadar *nguri-uri* atau melestarikan budaya dan

tradisi yang ada, tapi juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka. "Saya berharap dengan Keistimewaan DIY lewat Danais ini bisa membuat langkah nyata untuk mensejahterakan masyarakat DIY," ungkapnya.

Menurut Octo Lampito, meski sudah 11 tahun UUK namun angka kemiskinan di DIY masih tinggi. Kondisi itu menjadi 'PR' yang membutuhkan perhatian bersama. Karenanya perlu kreativitas dari Kraton Yogyakarta, kampus, kampung dan stakeholder terkait lainnya un-

tuk menjabarkan agar Danais bisa bermanfaat untuk kesejahteraan. Salah satunya lewat ekonomi kerakyatan dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya.

"Saat ini ekonomi kerakyatan di DIY mulai tumbuh. Bahkan DIY sudah menjadi gudangnya ekonomi kreatif. Apalagi secara keseluruhan terdapat 17 subsektor ekonomi yang berkembang. Utamanya craft, fashion dan kuliner. Untuk itu gerakan ekonomi kreatif harus terus digalakkan dengan berbagai cara," terangnya. (Ria)

## Karen Sambungan hal 1

untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040, sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.

Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.

Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.

Selain itu, pelaporan untuk menjadi ba-

hasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.

Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.

Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA menimbalkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,1 triliun.

Atas perbuatannya, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant)

## Presiden Sambungan hal 1

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi peran dan kontribusi aktif PP Pemuda Muhammadiyah serta Kokam dalam membantu masyarakat. Ia menilai, kontribusi langsung untuk membantu masyarakat tersebut yang membuat organisasi Muhammadiyah semakin dicintai masyarakat.

"Karena budaya saling membantu, saling peduli adalah nilai luhur anugerah Allah SWT yang memampukan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan

dan bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Pada akhirnya Presiden meminta keluarga besar Muhammadiyah ikut menjaga keberlanjutan pembangunan bangsa, sehingga menjadi Indonesia yang dicitakan.

"Alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya dan bahkan bertumbuh di tengah beratnya tantangan yang dihadapi dunia," ujarnya. (Ant)

## BMKG Sambungan hal 1

Kabupaten Gunungkidul ada di Gedangsari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Playen, Ponjong, Tepus dan Wonosari. Kabupaten Kulonprogo hanya di Girimulyo. Untuk Kabupaten Sleman tersebar di Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Kalasan, Ngemplak, Pakem, Sleman dan Turi.

"Kepada masyarakat serta pemerintah

daerah setempat yang berada dalam wilayah peringatan dini untuk mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis. Di sektor pertanian dengan sistem tadah hujan. Bisa dengan pengurangan ketersediaan air tanah (kelangkaan air bersih) serta peningkatan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," jelasnya. (Awh)-f

## Blokir Sambungan hal 1

Adapun permintaan penutupan akses ke rekening-rekening tersebut, kata Budi, berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemblokiran rekening terkait judi online juga merupakan upaya menciptakan ruang digital yang bersih dari judi online maupun judi slot sesuai amanat pasal 27 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelumnya, Budi mengatakan hingga

17 September 2023 pihak perbankan dan platform telah melakukan pemblokiran terhadap 1.450 rekening dan 1.005 e-wallet atau dompet digital. Selain itu, Kementerian Kominfo telah menemukannya rekening terkait perjudian sebanyak 1.931 rekening.

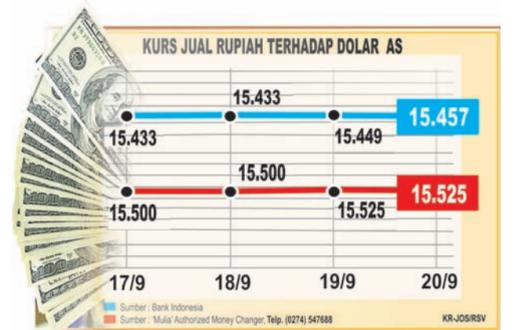
Lalu untuk penanganan konten sejak tanggal 17 Juli sampai dengan 17 September 2023, Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 109.090 konten judi online dan 92 konten penipuan. (Ant/Obi)-f

## KPK Sambungan hal 1

"Terkait perkembangan perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu beberapa waktu lalu, telah kami sampaikan proses penyidikannya telah selesai sehingga kami lakukan analisa untuk proses berikutnya dan kami mengonfirmasi bahwa betul saat ini sudah naik pada proses penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.

Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Saat ini penyidik KPK sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut. Setelah alat bukti dinyatakan cukup, penyidik KPK nantinya akan melakukan penahanan serta mengumumkan kepada pu-



Prakiraan Cuaca Kamis, 21 September 2023

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	☀	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☀	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☀	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☀	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☀	☁	☁	☁	22-30	65-95

## Ki Geter Sambungan hal 1

menabuh gamelan gender mengiringi dalam Ki Timbul, Ki Hadi Sugito dan terakhir Ki Seno Nugroho. Dari mengikuti para dalang inilah bisa memperoleh pengalaman, sehingga menambah kemampuan mengenai soal jagat pedalangan," papar Ki Geter yang kelahiran Bantul, 25 Desember 1973 ini.

Sebelum akhirnya tergabung dalam 'Warga Laras' milik Ki Seni Nugroho, Geter tahun 1996-2006 menjadi penggander dan arranger grup Campusari Gunung Kidul (CSGK) pimpinan Manthou's. Setelah itu hingga sekarang bergabung lagi bersama karawitan 'Wargo Laras' spesial menjadi

penggander dan penata iringan. "Karena itu, ketika saya mendalang, juga mengajak sinden dan teman-teman karawitan Wargo Laras," ucapnya.

Selama memilih menjadi pengawit dan dalang, Geter menginginkan bisa secara profesional dengan mengutamakan kualitas, baik dalam menggarap panggung cerita, iringan karawitan, sabet (perang) dan mengembangkan kemampuan untuk memenuhi atau menyesuaikan tuntutan zaman.

Pada tahun 1999, ia pernah ikut pentas tour di 7 kota besar Jepang bersama koreografer dan penari Miroto (almahum). Kemudian, bersama pemusik Djadug Ferianto (almahum). Selain itu, tahun

2013, tampil melawat keluar negeri bersama Ki Seno Nugroho (almahum), dalam gelaran Festival Wayang Dunia di Buenos Aires Argentina. Tahun 2014, kembali bersama Ki Seno, tampil dalam ajang Festival Wayang di Polandia.

Soal wayangan untuk peringatan 78 Tahun SKH KR, Ki Geter, berusaha tampil maksimal dengan pentas wayang kulit klasik gaya Yogya dan sebagian iringan memasukkan gaya Surakarta.

"Saya sebagai dalang Yogyakarta, harus mempunyai jati diri dalam melakukan pengembangan gelaran wayangan menyesuaikan tuntutan zaman," katanya. (Cil)-f

## Nilai Sambungan hal 1

Ketika diksi luhur dibaurkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaannya dapat dimetaforakan bagaikan dua kaki manusia. Kaki kanan dan kaki kiri harus melangkah seiring sejalan beraturan. Untuk itu, kedua kaki manusia harus rela diatur bergantian guna melangkah ke depan, mundur ke belakang atau serong ke kanan dan kiri. Mengapa harus diatur? Karena keseimbangan tubuh seseorang akan terjaga dengan baik manakala kedua kaki manusia mampu menopang tubuhnya secara proporsional dan harmonis. Selanjutnya kedua kaki itu digerakkan secara harmonis dan proporsional untuk mencapai satu tujuan.

Dengan demikian, atas nama diksi luhur yang kemudian disematkan nilai luhur. SFY dapat diposisikan sebagai bagian dari proses representasi entitas kebudayaan Yogyakarta. Keberadaannya dinilai memiliki kandungan makna konotasi bermendemi kemuliaan yang tinggi.

Atas dasar itu, muncullah konsekuensi logis yang harus ditindaklanjuti. Apa itu? Wajib disegerakan upaya kerja sosial untuk *nguri-uri* kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat sesuai dengan konteks perkembangan zaman. *Nguri-uri* kebudayaan dalam perspektif SFY tidak boleh dipahami

secara puritan! Melainkan harus dengan cara yang egaliter, santun dan bermartabat.

Siapa target sasarannya? Tentu saja generasi Milenial, Gen-Z dan Alpha. Mereka merupakan lintasan generasi bonus demografi yang harus didedikasi perihai SFY. Kepada merekalah SFY diwariskan. Selanjutnya, mereka dibimbing untuk *nguri-uri* kebudayaan Yogyakarta dengan fokus utama SFY. Jangan sampai momentum penetapan SFY tidak mampu menggerakkan hati dan pikiran generasi Milenial, Gen-Z dan Alpha.

Ketika UNESCO mengukuhkan SFY sebagai warisan dunia, seyogianya peristiwa bersejarah itu dibaca sebagai proses estafet penganugerahan warisan SFY yang selama ini dipeluk erat generasi *sepuh*. Sudah saatnya diwariskan sepenuhnya kepada generasi Milenial, Gen-Z dan Alpha sebagai pemilik peradaban dan kebudayaan Yogyakarta masa depan. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi peristiwa *kepaten obor*.

Dalam perspektif budaya visual, keberadaan SFY senantiasa menghadirkan citra visual kemuliaan secara total. SFY memiliki tugas sosial untuk mengajarkan cara menghormati antarumat manusia. Wujudnya seperti apa? Terciptanya kerja

kolaborasi dengan melibatkan konsep ajaran hidup untuk saling menghormati dan memuliakan. Siapa saja yang harus dilibatkan? Ada tiga ekosistem yang harus selalu digandeng secara intens. Ketiga ekosistem itu meliputi pejabat publik yang mengemban amanah sebagai pemimpin sekaligus pelayan masyarakat. Perlu juga dirangkul warga masyarakat dan lingkungan hidup yang melingkupinya. Mereka berdua biasanya *dicasting* menjadi objek sekaligus subjek. Meskipun demikian, mereka wajib dilindungi, dilayani serta dijaga keamanannya agar senantiasa nyaman lahir batin.

Sinergi dan kolaborasi atas triadik ekosistem yang dijalankan dengan mengedepankan nilai luhur seperti disampaikan Sultan HB X harus terus menerus diaktivasi serta dijalankan secara konsisten. Harus disepakati bersama, nilai-nilai luhur merupakan akumulasi konsep tenggang rasa dalam hidup bermasyarakat. Semuanya merupakan kata kunci guna mengejawantahkan *lelahu* hidup sosial secara harmonis antarmasyarakat dengan semesta raya beserta segala isinya.

(Penulis adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual, FS-RD ISI Yogyakarta)-f

# Pejuang Keberpihakan Publik



**Ferri Wicaksono, S.I.P., MA.**  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

TULISAN ini terinspirasi dari kunjungan lapangan penulis di kawasan Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu penulis mengunjungi ECOTON (Lembaga Kajian

Ekologi dan Konservasi Lahan), salah satu lembaga swadaya masyarakat yang concern pada permasalahan lingkungan terutama penyelamatan dan perlindungan sungai. Batasan lingkup permasalahan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh kegelisahan yang selanjutnya berkembang menjadi kesadaran untuk bergerak memperjuangkan keberpihakan publik. Menarik melihat komitmen lembaga tersebut dengan menyebut diri mereka sebagai river warrior. Kerusakan lingkungan sungai telah berkembang menjadi persoalan publik, mengapa demikian?

Semakin massif pencemaran lingkungan sungai yang disebabkan oleh limbah dan mikroplastik yang

disebabkan oleh sebagian aktivitas industri yang terindikasi tidak bertanggung jawab. Intinya kerugian akibat pencemaran lingkungan sungai tidak lagi dirasakan oleh kalangan terbatas saja, namun semakin luas sehingga perlu ada para pihak yang tentu juga harus semakin massif "menyadarkan para pelaku". Bukan lagi sebatas tanggung jawab pemerintah, kita sebagai bagian dari publik tentu harus menyadari tanggung jawab kita untuk turut serta berkontribusi. Bagaimana kita bisa berperan?

Belajar dari ECOTON, setidaknya ada 3 (tiga) lingkup peran yang bisa kita kontribusikan sebagai berikut: Edukasi, Advokasi, dan Penelitian. Pertama, peran edukasi dapat dilakukan

dengan kita melakukan aktivitas pelatihan, sosialisasi, aktif didalam aktivitas pameran lingkungan dan sebagainya. Kedua, peran advokasi dapat diistilahkan dengan kita secara tegas melakukan pembelaan terhadap publik atas implikasi negatif dari aktivitas industri yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. ECOTON dengan tegas menyatakan publik harus berani menunjukkan keberpihakannya, bahkan jika diperlukan melalui demonstrasi hingga audiensi. Ketiga, peran penelitian, sebagaimana yang dilakukan ECOTON, mereka secara sukarela melakukan penelitian terhadap kualitas air sungai, hingga melakukan pengawasan aktivitas pembuangan limbah industri.

Cara mereka menunjukkan keberpihakan publik tidak sebatas bersuara lantang, namun diwujudkan dengan berbagai aktivitas komprehensif sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan sungai. Didalam menunjukkan aktivitas keberpihakannya, mereka selalu berupaya membekali diri dengan basis data yang kuat melalui penelitian dan observasi. Mereka tidak mencari kambing hitam atas munculnya persoalan publik, namun berkontribusi mewujudkan solusi.

Tentunya kita sebagai publik menginginkan lingkungan yang kondusif dan produktif. Berkembangnya persoalan publik, diawali dari kegagalan kita mengendalikan dan membatasi perkembangannya persoalan tersebut. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangat terbatas ruang perannya tanpa kontribusi nyata publik. Aktivitas perjuangan ECOTON dalam menunjukkan keberpihakan publik memberi pembelajaran bagi kita terutama penulis pribadi bahwa kita harus mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan publik.

Disetiap upaya menciptakan lingkungan sungai yang nyaman dan layak huni, tentu masih ada saja oknum yang kurang bertanggung jawab dengan memberi sumbangsih pencemaran. Mereka hanya perlu lawan tanding yang mampu menghentikan ketidakbertanggung jawaban mereka terhadap lingkungan sungai. Itu bisa dimulai dari kita menyadarkan diri kita untuk ikut berjuang secara nyata sebagai realisasi keberpihakan publik. Kita bisa berbicara lantang ketika kita mampu menunjukkan data, kita bisa berkontribusi nyata ketika kita memiliki kemauan untuk berperan. Kita tidak lagi menyalahkan pemerintah atas persoalan publik yang terus berkembang, namun bersama-sama mengatasi persoalan publik.

Diakhir tulisan ini, penulis secara khusus mengapresiasi setinggi-tingginya para pejuang keberpihakan publik dan sekaligus memotivasi diri pribadi penulis beserta para pembaca untuk berkontribusi nyata sebagai pejuang keberpihakan publik.

